

Diunggah : November 2022

Diterima : Februari 2023

Dipublikasi : Juli 2023

DETERMINASI TERHADAP KUALITAS INFORMASI FINANSIAL PEMERINTAH DAERAH

Sahala Purba¹, Rasdianta Purba^{2*}¹sahala824@gmail.com^{1,2}Universitas Methodist Indonesia

*Penulis Korespondensi

Abstrak

lemahnya sistem pengelolaan intern pemerintah, tidak maksimalnya penggunaan teknologi informasi dan kurang maksimalnya fungsi internal audit dalam melaksanakan fungsinya secara efektif dan efisien. Adapun maksud pengkajian ini untuk memahami dan menganalisis dampak pengetahuan akuntansi, sistem pengelolaan internal pemerintah, penggunaan teknologi informasi dan fungsi internal audit secara parsial maupun secara simultan. Bentuk pengamatan ini menggambarkan pengamatan asosiatif yang bersifat kausal dan memakai data primer. Sistem pengambilan data yang dipakai adalah kuesioner. analisis deskriptif dan regresi linear berganda. bentuk analisis yang digunakan pada pengamatan ini. Penelitian ini dilakukan di Organisasi Perangkat Daerah se-Kabupaten Deli Serdang. Responden dalam penelitian ini sebanyak 69 orang. Hasil pengkajian ini membuktikan bahwa secara parsial pengetahuan akuntansi, sistem pengelolaan intern pemerintah dan penggunaan teknologi informasi berdampak positif terhadap mutu laporan finansial pemerintah daerah, sedangkan fungsi internal audit berdampak negatif terhadap kualitas informasi finansial pemerintah daerah. Secara bersama-sama pengetahuan akuntansi, sistem pengelolaan intern pemerintah dan penggunaan teknologi informasi berdampak terhadap mutu informasi finansial pemerintah daerah di Kabupaten Deli Serdang. Adapun implikasi dari penelitian ini adalah dengan adanya pengetahuan akuntansi yang baik didukung sistem pengelolaan intern pemerintah yang kuat, dan penggunaan teknologi informasi serta adanya fungsi internal audit yang optimal akan dapat menaikkan mutu informasi finansial pemerintah daerah yang ada di seluruh pemerintahan daerah di Indonesia khususnya pada Kabupaten Deli Serdang.

Kata Kunci: Pengetahuan Akuntansi; Sistem Pengelolaan Intern Pemerintah; Penggunaan Teknologi Informasi; Fungsi Internal Audit dan Mutu Informasi Finansial Pemerintah Daerah.

Abstract

The problem with the quality of local government financial information is the irrelevance of the financial information presented in accordance with applicable ethics. Local government financial information can be problematic due to low human resources with accounting knowledge in the preparation of financial information, weak government internal management systems, not optimal use of information technology and less than optimal internal audit function in carrying out its functions effectively and efficiently. The purpose of this study is to understand and analyze the impact of accounting knowledge, the government's internal management system, the use of information technology and the internal audit function partially or simultaneously. This form of observation describes causal associative observations and uses primary data. The data collection system used is a questionnaire. descriptive analysis and multiple linear regression. form of analysis used in this



observation. This research was conducted in Regional Apparatus Organizations throughout Deli Serdang Regency. Respondents in this study were 69 people. The results of this study prove that partially accounting knowledge, government internal management systems and the use of information technology have a positive effect on the quality of local government financial reports, while the internal audit function has a negative effect on the quality of local government financial information. Taken together, accounting knowledge, government internal management systems and the use of information technology affect the quality of local government financial information in Deli Serdang Regency. The implications of this research are that good accounting knowledge is supported by a strong government internal management system, and the use of information technology and an optimal internal audit function will be able to increase the quality of local government financial information in all local governments in Indonesia, especially in the District. Deli Serdang.

Keywords: *Knowledge of Accounting, Government Internal Management System, Use of Information Technology, Internal Audit Function and Quality of Local Government Financial Information.*

PENDAHULUAN

Era globalisasi saat ini mengupayakan setiap organisasi untuk mampu memperlihatkan akuntabilitas yang baik, tidak terkecuali dalam instansi pemerintahan. Tetapi tidak jarang di dalam instansi pemerintahan sering ditemukan banyak kesalahan kesalahan yaitu tidak relevan-nya laporan finansial yang disajikan, situasi ini disebabkan akibat tidak seperti pada etika yang telah disahkan. Informasi finansial pemerintah daerah dituntut harus bisa menyampaikan keterangan yang bermutu. Pengembangan kapasitas informasi finansial ini diinginkan agar memperoleh peningkatan integritasnya, mampu menyampaikan informasi yang lengkap, sesuai atas kepentingan pemakainya dan memberikan potensi untuk memicu ketentuan-ketentuan rasional terkait distribusi dana ke instansi pemerintah tersebut. Informasi finansial pemerintah daerah bisa didefinisikan bermutu bilamana mempunyai individual kualitatif tertentu sesuai atas standar yang telah ditetapkan. Ditemukan empat individual kualitatif informasi finansial yaitu relevan, teruji, mampu dimengerti dan dapat dibedakan.

Standar akuntansi yang ditetapkan selaku pedoman penyusunan dan pengajuan informasi finansial pusat maupun daerah yaitu PP No. 71 Tahun 2010 dan Etika Akuntansi Pemerintahan edisi 2019. Meskipun telah ditetapkannya standar akuntansi sebagai pedoman, ternyata masih banyak ditemukan kesalahan dalam penyajian laporan keuangan., BPK mengutarakan secara lebih terperinci ada 9.116 temuan yang memuat 14.965 persoalan, mencakup 7.236 (48%) persoalan kelemahan sistem pengelolaan intern (SPI) dan 7.636 (51%) persoalan ketidaktaatan pada ketetapan peraturan perundang-undangan sebesar Rp.9,68 triliun, serta 93 (1%) persoalan ketidakhormatan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan sebesar Rp.676,81 miliar (<https://www.bpk.go.id/ihps/2019/I>).

Terlihat dari fenomena diatas telah menggambarkan bahwa terjadi pertanggungjawaban laporan finansial yang kurang baik, sehingga dapat menurunkan mutu laporan finansial tersebut.

Hasil pengamatan BPK juga menyampaikan terdapat persoalan ketidakserasian penyapaian akun dengan etika akuntansi pemerintah pada Informasi finansial pemerintah daerah tahun 2020.

Tabel 1. Persoalan Ketidakserasian Penyajian Akun Dengan SAP Pada LKPD 2020

Nama Akun	Jumlah PEMDA Yang Menjalankan Kesalahan
Asset Lancar	19
Asset Tetap	39
Asset Lainnya	21
Belanja Operasi	15
Belanja Modal	19

Dari bagan diatas, membuktikan kualitas informasi finansial pemerintah daerah masih ditemukan persoalan, yaitu sebagian akun yang diberikan tidak sinkron dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Hal ini juga akan menurunkan mutu informasi finansial.

Dari mutu informasi finansial pada tabel diatas, maka peneliti mengambil beberapa variabel yang mempengaruhi mutu informasi finansial antara lain pengetahuan akuntansi, sistem pengelolaan intern pemerintah, penggunaan teknologi informasi dan fungsi internal audit.

Adapun aspek-aspek yang mempengaruhi mutu informasi finansial pemerintah daerah antara lain : (a) pemahaman akuntansi [(Lestari & Dewi, 2020), (Yeni et al., 2020), (Atika et al., 2019), (Aniftahudin, 2016)], dan (b) Sistem pengendalian intern pemerintah [(Lestari & Dewi, 2020), Utami dan Merta (2020), (Mulia, 2018), (Mene et al., 2018), Wijayanti (2017), dan (Sari, 2016)] (c) Pemanfaatan teknologi informasi [(Purba et al., 2021), (Wibawa dan Sinarwati, 2017), (Wijayanti, 2017), (Aniftahudin, 2016), dan (Haza, 2015)]; (d) Peran internal audit [Fadilah (2021), (Atika et al., 2019), (Nazaruddin & Syahrial, 2017), (Setyowati & Isthika, 2014), dan (Nova, 2015)] dan lain sebagainya, namun yang paling banyak mempengaruhi mutu laporan finansial adalah pengetahuan akuntansi dan penggunaan teknologi informasi.

Rendahnya mutu informasi finansial aparat daerah dapat disebabkan oleh rendahnya SDM atas pengetahuan akuntansi dari penyusunan laporan itu sendiri. Terdapat fakta dilapangan bahwa pernah ditemukan sistem pencatatan keuangan tidak dilakukan sesuai langkah-langkah yang seharusnya, yakni bendahara hanya memanfaatkan kuitansi-kuitansi maupun nota-nota untuk memperhitungkan kas keluar dan kas masuk di daerah tersebut. Dan faktanya juga masih ditemukannya masalah sejenis yaitu kurangnya jumlah aparatur di bidang akuntansi terutama yang memiliki dorongan edukasi di aspek akuntansi sehingga terkendala waktu, tenaga dan pikiran saat pendampingan kepada perangkat daerah saat pembentukan laporan finansial (<https://bpka.deliserdangkab.go.id>).

Hal ini sependapat pada pengamatan yang diteliti oleh (Lestari & Dewi, 2020), (Yeni et al., 2020),(Atika et al., 2019), (Hasanah, 2019), dan (Aniftahudin, 2016) membuktikan bahwa pengetahuan akuntansi berdampak terhadap mutu informasi finansial aparat daerah. Tentang ini tidak sependapat pada pengamatan yang dilaksanakan oleh (Nova, 2015) yang mengatakan bahwa pengetahuan akuntansi tidak berdampak pada mutu informasi finansial aparat daerah.

Mutu informasi finansial pemerintah daerah juga dapat bermasalah karena lemahnya Sistem Pengelolaan Intern Pemerintah. Sesuai fakta di lapangan, lemahnya Sistem Pengelolaan Intern ini dapat berdampak pada kualitas korupsi

pada pemerintah daerah di Indonesia, yang berarti informasi finansial pemerintah daerah seharusnya memiliki unsur transparansi dan akuntabilitas (Setiawan, 2012). Terlihat juga fakta dilapangan tempat penelitian ini ditemukan bahwa masih belum optimalnya pelaksanaan sistem pengawasan internal, hal ini menjadi akar masalah pada RENSTRA BPKA 2019-2024 (<https://bpka.deliserdangkab.go.id>).

Tentang ini sependapat dengan pengamatan yang diteliti oleh (Lestari & Dewi, 2020), Utami dan Merta (2020), (Mulia, 2018), (Febriana & Praptoyo, 2015)(Mene et al., 2018), Wijayanti (2017), dan (Sari, 2016) mengemukakan metode pengelolaan intern pemerintah berdampak terhadap mutu informasi keuangan aparat daerah. Sedangkan pengamatan yang dilaksanakan oleh (Purba et al., 2021), dan (Kaifah & Tryana, 2020) yang menyatakan bahwa sistem pengelolaan intern tidak berdampak terhadap mutu informasi finansial aparat daerah.

Mutu informasi finansial pemerintah daerah bermasalah karena kurangnya penggunaan teknologi informasi dimana terdapat fakta dilapangan bahwa seringkali teknologi informasi tidak mencapai penjelasan yang akurat sehingga kurangnya penyampaian fungsi bagi instansi tertentu (Tiara, 2019). Ditemukan juga fakta dilapangan bahwa pemanfaatan teknologi informasi belum dimanfaatkan secara maksimal, ini terlihat pada bentuk pengambilan dan pengerjaan data kinerja masih dalam bentuk mengembangkan mutu sistem pelaporan dan pertanggungjawaban perangkat daerah serta mengembangkan mutu reuiu atas laporan kinerja (<https://bpka.deliserdangkab.go.id>). Artinya penggunaan teknologi informasi ternyata masih menjadi kendala atau hambatan yang perlu diperbaiki kedepannya. Jadi seharusnya teknologi informasi haruslah dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin agar informasi finansial pemerintah daerah mampu membentuk penjelasan akuntansi yang berkualitas, dengan teknologi informasi yang maksimal sehingga informasi akuntansi tersebut dapat dipergunakan untuk pemungutan kesimpulan dalam bentuk pengembangan kinerja pemerintah daerah. Hal ini juga didukung pada pengamatan yang dilakukan oleh (Purba et al., 2021), Wibawa dan Sinarwati (2017), Wijayanti (2017), (Aniftahudin, 2016), dan (Haza, 2015) menyatakan bahwa penggunaan teknologi informasi berdampak pada mutu informasi finansial aparat daerah. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Setyowati dan (Lilis Setyowati, Wikan Isthika, 2016) mengemukakan bahwasannya pemakaian teknologi informasi tidak berdampak pada mutu informasi finansial aparat daerah.

Fungsi internal audit yang lemah dapat membuat mutu informasi finansial pemerintah menjadi bermasalah. Contoh fakta dilapangan yaitu salah satu daerah di Provinsi Sulawesi-Selatan menggapai predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK-RI. Dari 25 entitas yang ada, 11 Kabupaten/Kota yang mendapatkan opini WTP. Menggapai WTP tidak berarti daerah tersebut lepas dari penyelewengan. Bagi 14 entitas lainnya dikatakan mutu informasi finansialnya masih rendah. Rendahnya mutu informasi dapat diakibatkan masih lemahnya fungsi audit internal (Windasari, 2018). Ditemukan juga fakta di lapangan bahwa saat ini, kapabilitas APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) pada Kabupaten Deli Serdang berada pada level 1 (*initial*). Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang untuk tahun 2016, menargetkan berada di level 2 (*infrastruktur*), dan tahun 2019 maturitas SPIP mendorong agar berada pada level 3 (<https://bpka.deliserdangkab.go.id>). Jadi fungsi internal audit sangatlah penting dalam meningkatkan mutu informasi

finansial aparat daerah. Mengenai ini sependapat dengan pengamatan yang dilakukan oleh Fadilah (2021), (Atika et al., 2019), (Nazaruddin & Syahrial, 2017), (Lilis Setyowati, Wikan Isthika, 2016), dan (Nova, 2015) menyatakan bahwa fungsi internal audit berdampak pada mutu informasi finansial aparat daerah. Hal ini tidak sependapat pada pengamatan yang diteliti oleh (Setyowati & Isthika, 2014) yang mengatakan bahwa fungsi internal audit tidak berdampak pada mutu informasi finansial aparat daerah.

Adapun perbedaan riset ini adalah memasukkan variabel pengelolaan teknologi dan fungsi internal audit dalam hubungannya dengan mutu informasi finansial aparat daerah di Kabupaten Deli Serdang, riset ini belum diteliti pada Kabupaten Deli Serdang oleh peneliti lain.

Pertanyaan dalam riset ini adalah pengetahuan akuntansi, sistem pengelolaan intern pemerintah, penggunaan teknologi informasi dan fungsi internal audit berdampak pada mutu informasi finansial aparat daerah di Kabupaten Deli Serdang?

Riset ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis hubungan serta mengungkapkan sejauh mana hubungan antara pengetahuan akuntansi, sistem pengelolaan intern pemerintah, penggunaan teknologi informasi dan fungsi internal audit berdampak pada mutu informasi finansial aparat daerah di Kabupaten Deli Serdang.

TINJAUAN PUSTAKA

Agency Theory

Filosofi agency pada awalnya ditemukan oleh Jensen & Meckling pada tahun 1976 dan mendeskripsikan ikatan **keagenan** menjadi sebuah perjanjian dimana satu atau lebih principal (pemilik) mengontrak orang lain (agen) untuk melaksanakan sebagian jasa untuk kebutuhan mereka dengan mengutus sebagian tugas untuk melaksanakan ketentuan pada agen (Jensen & Meckling, 1976).

Informasi finansial daerah berkualitas adalah hal yang paling dibutuhkan oleh pihak eksternal. Pada filosofi agency, penjelasan mengenai akuntansi mengenakan dua tujuan. Pengambilan keputusan oleh pemilik dan manajemen adalah hal yang pertama. Dan yang kedua, digunakan untuk membandingkan dan mengklasifikasikan sesuai dengan hasil ketentuan kerja yang telah disetujui (Raharjo, 2007).

Adapun yang menjadi principal dalam riset ini adalah pemerintah pusat/Inspektur dan masyarakat Kabupaten Deli Serdang, sedangkan yang menjadi agennya adalah pemerintah daerah/aparatur Kabupaten Deli Serdang yang harus melaksanakan amanat yang diberikan oleh principal kepada mereka dan wajib mempertanggungjawabkan untuk sebagai evaluasi kepada pihak principal akan pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh agen dalam hal ini tentang mutu laporan finansial pemerintah daerah.

Filosofi ini menggambarkan program yang membuktikan hubungan kesepakatan antara pemilik dengan manajemen. Gagasan perihal kinerja finansial dalam bentuk informasi finansial yang bernilai terletak pada filosofi ini (Jensen & Meckling, 1976), pengatur perusahaan dilakukan dengan kepatuhan atas syarat

yang sah (Rachmad, 2013), keagenan juga terdapat dalam kalangan lembaga pemerintahan. Masyarakat selaku principal memberikan wewenang pada pemerintah menjadi agen, untuk menjalankan tugas pemerintahan selama rangka mengembangkan kemakmuran rakyat. Keterkaitan dari aturan, principal selaku rakyat harus melaksanakan penjagaan terhadap penyalur baik yaitu pemerintah maupun para politisi. Fadzil & Nyoto dalam jurnal (Hardiningsih et al, 2019) juga mengemukakan bahwa ditemukan ketertarikan principal dengan agen.

Menurut Filosofi Agency, bagian agen atau pemerintah daerah saat kondisi ini perlu mempertanggungjawabkan semua yang menjadi tanggung jawabnya seperti pembentukan laporan finansial pemerintah daerah yang bermutu, menerapkan transparansi, dan benar benar memberikan bukti fisik sebagai bukti pertanggungjawabannya kepada pemerintah pusat dan masyarakat yang menjadi principal dalam hal ini. Dapat dikatakan bermutu apabila laporan finansial tersebut telah disusun sesuai karakter kualitatif yang telah ditentukan yakni relevan, teruji, bisa dimengerti dan bisa dibedakan. Jadi ketika pihak principal menerima sepenuhnya laporan dari pihak agen, tidak ada unsur kecurigaan dari pihak manapun karena penyusunannya telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan standar yang telah ditetapkan.

Mutu Laporan Finansial Pemerintah Daerah

Penjelasan informasi finansial berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 dan Etika Akuntansi Pemerintahan edisi 2019 sebagai berikut “Laporan Finansial merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi- transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan”: Indikatornya adalah 1) Signifikan, 2) Jujur, 3) Bisa dibedakan, 4) Bisa dipahami (Mahmudi,2016)

Pengetahuan Akuntansi

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Poerwadarminta (2006) dalam Yuliani (2010) diartikan sebagai pemahaman, gagasan, aliran haluan, ajaran, dari seorang individu terhadap sesuatu, sedangkan penafsiran diartikan seperti metode, perbuatan, cara menafsirkan, atau cara menafsirkan diri seorang individu terhadap sesuatu hal. Artinya adalah dapat dikatakan bahwa orang yang pandai dan benar mempunyai pengetahuan akuntansi serta mengerti setiap metode akuntansi sampai menjadi suatu informasi finansial yang diterapkan sesuai dengan dasar dan etika dalam PP No 71 Tahun 2010 tentang Etika Akuntansi Pemerintahan. Adapun indikatornya adalah: 1) Paham terhadap bagian informasi finansial, 2) Mengerti terhadap pengakuan komponen-komponen informasi finansial, 3) Memahami metode akuntansi mulai dari transaksi hingga membentuk informasi finansial (Harahap, 2017)

Sistem Pengelolaan Intern Pemerintah

Definisi pengelolaan intern menurut Committee of Sponsoring Organization treadway Commision (COSO, 2013) adalah “Pengelolaan intern yang dimaksud adalah suatu metode yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen dan karyawan yang dipersiapkan untuk menyampaikan jaminan yang menyakinkan bahwa misi organisasi akan dapat dicapai, ketaatan terhadap Undang-Undang yang berlaku”. Indikatornya menurut PP No. 60 Tahun 2008 adalah: 1) Daerah

pengelolaan, 2) Evaluasi efek, 3) Penanganan, 4) Laporan dan Hubungan, 5) Pengamatan dan pengelolaan intern.

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti teknologi informasi adalah pendaayagunaan teknologi seperti komputer, elektronik, dan telekomunikasi, untuk mengerjakan dan menyalurkan informasi dalam bentuk digital. Indikatornya adalah: 1) Perangkat keras computer, 2) Perangkat Lunak komputer, 3) Jaringan dan Komunikasi, 4) Database, 5) Personalia Teknologi Informasi (Suyanto, 2005:11).

Fungsi Internal Audit

Suatu kegiatan otonom, ketentuan ilmiah dan konsultasi yang ditata untuk mendukung kualitas dan meninggikan proses organisasi adalah menggambarkan internal audit (Yuliani, 2010). Indikatornya adalah: 1) Evaluasi terhadap kualitas ketelitian dan keunggulan informasi finansial, 2) Evaluasi kualitas patuh terhadap strategi dan prosedur, 3) Pengembangan mutu penyaji laporan kewajiban finansial, 4) Berlakunya guna pengendalian, 5) Membuktikan kepatuhan terhadap kebijakan, 6) Mengenali tahap penyelewengan (Sawyer, 2005).

Dampak Pengetahuan Akuntansi Terhadap Mutu Informasi Finansial Pemerintah Daerah

Menurut teori agensi, pihak agen atau pemerintah daerah harus mampu melaksanakan tanggung jawabnya yaitu menyusun informasi finansial sesuai dengan prinsip dan indikatornya, karena pihak principal atau pemerintah pusat dan masyarakat mengharapkan pertanggungjawaban yang berkualitas dari tanggungjawab pihak agen.

Dapat dikatakan seseorang yang mempunyai pengetahuan akuntansi adalah orang yang cerdas dan tepat serta mengerti metode akuntansi yang mencapai satu laporan finansial yang diterapkan sesuai atas dasar dan kriteria sesuai PP No 71 Tahun 2010 tentang Etika Akuntansi Pemerintahan, yaitu mengerti terhadap bagian laporan finansial, mengerti terhadap penetapan unsur-unsur laporan finansial, mengerti metode akuntansi dimulai dari transaksi hingga membentuk laporan finansial. Pentingnya dampak pengetahuan akuntansi terhadap mutu informasi finansial pemerintah daerah juga dibuktikan oleh riset yang dilakukan oleh (Lestari & Dewi, 2020),(Yeni et al., 2020), (Atika et al., 2019), (Hasanah, 2019), dan (Aniftahudin, 2016) yang membuktikan bahwa pengetahuan akuntansi berdampak signifikan terhadap mutu informasi finansial pemerintah daerah.

Dari hasil teori agency, peraturan pemerintah dan hasil penelitian terdahulu, maka peneliti menarik hipotesis:

H1: Pemahaman Akuntansi Berdampak Positif dan Signifikan Terhadap Mutu Informasi Finansial Daerah.

Dampak Sistem Pengelolaan Intern Pemerintah terhadap Mutu Informasi Finansial Pemerintah Daerah

Menurut teori agency, pihak agen harus mampu melaksanakan tanggung jawabnya secara efisien dan efektif agar mampu mempertanggungjawabkan

tugasnya sesuai dengan peraturan yang ada kepada pihak principal yaitu pemerintah pusat dan masyarakat.

Pada PP No 60 Tahun 2008 dijelaskan bahwa indikator dalam bentuk pengelolaan intern pemerintah yaitu: Lingkungan pengelolaan, Evaluasi efek, pengawasan informasi dan komunikasi, pengamatan dan pengelolaan intern.

Pentingnya sistem pengendalian intern pemerintah ini juga sependapat dengan penelitian yang dilakukan oleh (Lestari & Dewi, 2020), Utami dan Merta (2020), (Mulia, 2018), (Mene et al., 2018). Wijayanti (2017), dan (Sari, 2016) menyatakan bahwa sistem pengelolaan intern pemerintah berdampak positif terhadap keandalan informasi finansial.

Dari hasil teori agency, peraturan pemerintah dan hasil penelitian terdahulu, maka peneliti menarik hipotesis:

H2: Sistem Pengelolaan Intern Pemerintah Berdampak Positif dan Signifikan Terhadap Mutu Informasi Finansial Daerah.

Dampak Penggunaan Teknologi Informasi terhadap Mutu Informasi Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut teori agency, pihak agen atau pemerintah daerah harus mampu mempertanggungjawabkan tugasnya secara maksimal dengan menggunakan teknologi informasi yang ada untuk menunjang membentuk informasi finansial yang berkualitas dan pelaporan secara tepat waktu kepada pihak principal.

Ahmad Yani (2008) menuturkan bahwa terlaksananya metode pemberitahuan penjelasan yang pesat dan cermat dapat membentuk informasi finansial yang baik, aparat pusat dan daerah bertanggung jawab bagi menumbuhkan dan memakai perkembangan teknologi informasi. Dalam bentuk ini, UU No.33 tahun 2004 mengenai skala finansial aparat pusat dan daerah mendelegasikan adanya bantuan metode informasi finansial daerah yang dilaksanakan secara nasional. Suyanto (2005:11) menjelaskan bahwa indikator penggunaan teknologi informasi dinilai dari ketersediaan perangkat keras komputer, perangkat lunak komputer, jaringan komunikasi, database dan personalia teknologi informasi. Pentingnya penggunaan teknologi informasi dalam pembentukan informasi finansial aparat daerah yang berkualitas juga dibuktikan oleh pengamatan yang diteliti oleh (Purba et al., 2021), Wibawa dan Sinarwati (2017), Wijayanti (2017), (Aniftahudin, 2016), dan (Haza, 2015) menguji bahwa metode informasi akuntansi finansial daerah berdampak positif signifikan terhadap mutu informasi finansial aparat daerah.

Dari hasil teori agency, peraturan pemerintah dan hasil penelitian terdahulu, maka peneliti menarik asumsi:

H3: Penggunaan Teknologi Informasi Berdampak Positif dan Signifikan Terhadap Mutu Informasi Finansial Daerah.

Dampak Fungsi Internal Audit terhadap Mutu Informasi Finansial Pemerintah Daerah

Menurut teori agency, pihak agen atau pemerintah daerah/ inspektorat mampu melakukan tugasnya secara efektif dan efisien dalam melangsungkan pengawasan internal sesuai dengan regulasi.

Memutuskan ketaatan informasi yang didapatkan untuk beragam unit/satuan kerja menjadi bagian yang integral pada organisasi pemerintah daerah adalah pekerjaan dari inspektorat Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 . Untuk memutuskan ketaatan informasi finansial yang dihasilkan oleh SKPD, inspektorat melaksanakan review terhadap laporan finansialnya..

Menurut Sawyer (2005) dalam Riyanti (2015), fungsi internal audit ini dinilai dari: evaluasi terhadap kualitas ketelitian dan keunggulan informasi finansial, evaluasi kualitas patuh terhadap strategi dan prosedur, pengembangan mutu penyaji informasi kewajiban finansial, berlakunya guna pengendalian, memastikan kepatuhan terhadap kebijakan , dan mengenali tahap penyelewengan. Pengamatan yang diteliti oleh Fadilah (2021), (Atika et al., 2019), (Nazaruddin & Syahrial, 2017), (Lilis Setyowati, Wikan Isthika, 2016), dan (Nova, 2015) mengemukakan bahwa fungsi internal audit berdampak positif dan signifikan pada mutu informasi finansial.

Dari hasil teori agency, peraturan pemerintah dan hasil penelitian terdahulu, maka peneliti menarik hipotesis:

H4: Fungsi Internal Audit Berdampak Positif dan Signifikan Terhadap Mutu Informasi Finansial Daerah.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode pengamatan yang digunakan adalah penelitian asosiatif kausal. Dan riset ini juga menjelaskan fenomena berupa ikatan antar variabel, dengan tujuan untuk mengukur asumsi dan mengenali ikatan sebab akibat antar faktor yang berbeda. Pada pengkajian ini terdapat faktor bebas (faktor yang mempengaruhi faktor terikat) dan faktor terikat (faktor yang dipengaruhi oleh faktor bebas). Periode penelitian berawal dari metode pemeriksaan hingga selesainya penelitian yaitu April-Maret 2022. Masyarakat pada penelitian ini adalah aparatur pemerintah yang terdapat di Kabupaten Deli Serdang yaitu sebanyak 31 perangkat daerah. Contoh dalam penelitian ini adalah semua penduduk yang diperiksa dengan pemilihan responden berlandaskan bentuk tertentu (purposive sampling). Memilih responden adalah tolak ukur yang dipakai untuk aparatur bagian keuangan. Lalu setiap perangkat daerah akan mengambil 3 penanggung, sehingga sampel penelitian ini sebanyak 31 sampel. Teknik dalam pengumpulan data penulis lakukan dengan menyebarkan kuesioner serta skala dalam pengukuran variabel dengan memakai skala interval. Model regresi linier berganda pertemuan matematika yang dipergunakan untuk menilai asumsi penelitian ini adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + e \dots\dots\dots(1)$$

Variabel Y adalah mutu informasi finansial pemerintah daerah, α adalah konstanta, β_1 hingga β_4 adalah koefisien regresi , X1 adalah pengetahuan akuntansi, X2 adalah sistem Pengelolaan intern pemerintah, X3 adalah penggunaan teknologi informasi dan X4 adalah fungsi internal audit, serta e adalah kesalahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik responden

Tabel 2. Responden bersumber pada Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	%
Laki-laki	31	44.9
Perempuan	38	55.1
Total	69	100.0

Dari tabel 2 dapat diungkapkan bahwa persentase pria sebesar 44,9% lebih kecil dari wanita sebesar 55,1%, itu berarti jumlah wanita lebih banyak bekerja salam kabupaten tempat penelitian melakukan riset.

Tabel 3. Responden bersumber pada pendidikan

Pendidikan Terakhir	Frekuensi	%
SMA	1	1.4
D3	1	1.4
S1	58	84.2
S2	9	13.0
Total	69	100.0

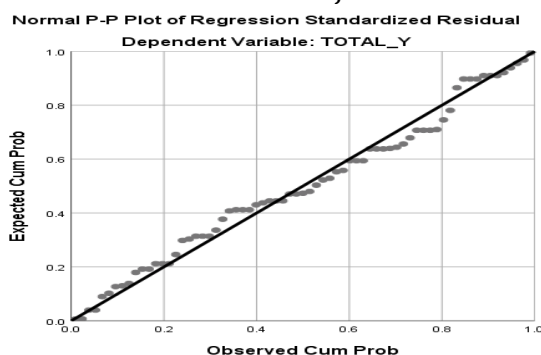
Dalam tabel 3 ini dapat diperhatikan bahwa mayoritas yang bekerja di tempat penelitian penulis adalah S1 sebesar 84,2% diikuti oleh S2 sebesar 13,0%.

Uji Validitas dan Reliabilitas

Nilai R_{tabel} pengamatan ini dapat diperoleh dengan melihat R_{tabel} dengan $n=69$, $df= n-2$ maka $df= 67$ dan taraf signifikansi 5% yaitu = 0.236. Berdasarkan hasil Tabel 4.10 diatas, hasil koefisien korelasi setiap penjelasan pada faktor lebih tinggi dari R_{tabel} 0.236 maka seluruh butir penjelasan pada kuesioner dinyatakan valid. Bentuk pemeriksaan uji reliabilitas mendapat 0.929 untuk variabel pemahaman akuntansi, 0.950 untuk variabel sistem pengelolaan intern pemerintah, 0.948 untuk variabel penggunaan teknologi informasi, 0.942 untuk variabel fungsi internal audit dan 0.960 untuk variabel mutu laporan finansial pemerintah daerah, hingga dengan demikian atas telah mencukupi bagian validitas dan reliabilitas bahwa pemeriksaan berikutnya yaitu uji asumsi klasik sudah dapat dilakukan.

Uji normalitas

Gambar 1. Grafik Plot Uji Normalitas



Tabel 4. Hasil Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

			Unstandardized Residual
N			69
Normal Parameters ^{a,b}			
Mean			.0000000
Std. Deviation			2.30218907
Most Extreme Differences	Extreme	Absolute	.082
		Positive	.082
		Negative	-.072
Test Statistic			.082
Asymp. Sig. (2-tailed)			.200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Untuk uji normalitas, penulis memakai grafik normal plot yang dilihat dari nilai sebaran terletak pada sekitar garis lurus, jika nilai sebaran berada pada garis lurus maka bias dapat dikatakan hasilnya normal. Penulis juga dapat mengukur statistic kolmogorov smirnov dari diagram diatas, dan memeriksa ukuran relevannya jika diatas 0,05 hingga data hingga bisa dikatakan beralokasi netral dalam bentuk pemeriksaannya bisa nilai relevannya 0,200 artinya bisa dikatakan datanya normal karena tingkat relevannya diatas 0,05.

Uji Multikolonieritas

Tabel 5. Hasil multikolinieritas

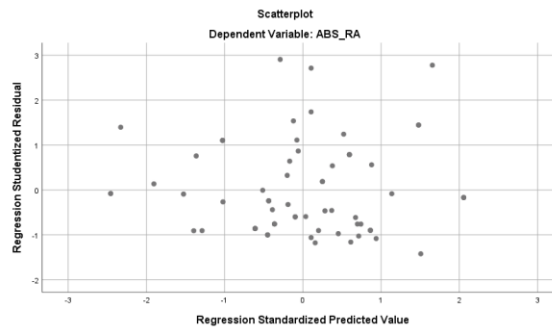
Model	VIF
(Constant)	
Pengetahuan_Akuntansi	1.203
Sisten_Pengelolaan_Intern_Pemerintah	4.179
Penggunaan_Teknologi_Informasi	5.089

Fungsi_Internal_audit	2.688
-----------------------	-------

Hasil pengawasan Multikolonieritas membuktikan bahwa tingkat toleransi faktor bebas <1,00 dan nilai dari VIF > 0,1. Perihal tersebut menyatakan tidak berlaku gejala Multikolonieritas antara faktor bebas pada penelitian ini.

Uji Heteroskedastisitas

Gambar 2. Grafik uji heteroskedastisitas



Tabel 6. Hasil Uji Glejser

Model	Sig.
1 (Constant)	.145
Pemahaman_Akuntansi	.445
Sisten_Pengendalian_Intern_Pemerintah	.592
Pemanfaatan_Teknologi_Informasi	.918
Peran_Internal_audit	.516

Tes heteroskedastisitas saat penelitian ini dilakukan untuk memeriksa diagram scatterplot, dapat dilihat pada titik-titik atau gelangan kecil yang meluas secara mengacak di atas maupun di bawah angka 0 merupakan hasil tersebut. Supaya penelitian bertambah sah sehingga penulis melaksanakan tes glejser situasi ini penulis memeriksa tingkat signifikannya tidak bisa dibawah 0,05, dari perolehan pemeriksaan tampak tingkat relevannya berada diatas 0,05 maka dengan demikian heteroskedastisitas tidak terjadi dan dapat dilaksanakan untuk proses tahap selanjutnya.

Uji Hipotesis

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 7. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Mode	B
1 (Constant)	.405
Pengetahuan_Akuntansi	.146
Sisten_Pengelolaan_Intern_Pemerintah	.379
Penggunaan_Teknologi_Informasi	.294
Fungsi_Internal_audit	-.146

Dari tabel 7 ini dapat disajikan persamaan regresinya berikut ini:

$$Y: 405 + 0.146X_1 + 0.379X_2 + 0.294X_3 - 0.146X_4 + e$$

Dari hasil perbandingan regresi tersebut, setiap variabel independen dapat dilihat nilai pengaruhnya terhadap variabel Mutu Laporan Finansial Pemerintah Daerah yaitu sebagai berikut: Nilai Konstanta sebesar 0.405 memiliki makna bahwa jika nilai semua variabel independen dianggap tidak mengalami perubahan (konstan), maka besarnya nilai adalah 0.405. Nilai koefisien Pengetahuan Akuntansi (β_1) sebesar 0.146 memiliki makna bahwa jika terjadi kenaikan nilai variabel pengetahuan akuntansi sebesar satu satuan (1%) maka nilai variabel dependen akan naik sebesar 0.146 serta dugaan faktor independen lainnya ditafsirkan tetap atau sama dengan 0. Nilai koefisien Sistem Pengelolaan Intern Pemerintah (β_2) sebesar 0.379 memiliki makna bahwa jika terjadi kenaikan nilai variabel partisipasi masyarakat sebesar satu satuan (1%) maka nilai variabel dependen akan naik sebesar 0.379 pada dugaan faktor independen lainnya ditafsirkan sama atau tetap dengan 0. Nilai koefisien Pemanfaatan Teknologi Informasi (β_3) sebesar 0.294 memiliki makna bahwa jika terjadi kenaikan nilai variabel Penggunaan Teknologi informasi sebesar satu satuan (1%) maka nilai variabel dependen mengalami kenaikan sebesar 0.294 dengan dugaan variabel independen lainnya dianggap tetap atau sama dengan 0. Nilai koefisien Fungsi Internal Audit (β_4) sebesar -0.146 memiliki makna bahwa jika terjadi kenaikan nilai variabel Peran Internal Audit sebesar satu satuan (1%) maka nilai faktor dependen mendapatkan penurunan sebesar -0.146 dengan dugaan faktor independen lainnya ditafsirkan sama atau tetap dengan 0.

Koefisien Determinasi

Tabel 8. Hasil uji Adjusted R²

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	.836 ^a	.698	.679

Dari pemeriksaan determinasi didapat adjusted R² = 0,679 yang artinya sebesar 67,9% mutu informasi finansial aparat daerah bisa dijelaskan oleh variabel pemahaman akuntansi, sistem pengelolaan intern pemerintah, penggunaan teknologi informasi dan fungsi internal audit, sedangkan selain itu sebesar 32,1% penulis mampu menjelaskan selain faktor yang cermati dalam penelitian ini karena sebab kekurangan dan waktu yang dimiliki oleh penulis.

Dampak Pengetahuan Akuntansi Terhadap Mutu Laporan Finansial Pemerintah Daerah

Hasil Asumsi H₁ diperoleh, artinya Pengetahuan Akuntansi berdampak positif dan signifikan pada Mutu Informasi Finansial Pemerintah Daerah. Ditunjukkan oleh hasil pengujian dalam pengamatan menunjukkan bahwa pengetahuan akuntansi secara parsial mempunyai dampak yang positif dan signifikan pada mutu informasi finansial pemerintah daerah se- Kabupaten Deli Serdang.

Secara teoritis, hasil riset ini sejalan dengan teori agency disebabkan pihak agen atau pemerintah daerah telah mempertanggungjawabkan semua yang menjadi

tanggung jawabnya secara maksimal dalam penyusunan informasi finansial pemerintah daerah sebagai pertanggungjawabannya kepada principal. Mutu informasi finansial pemerintah daerah dapat dipengaruhi oleh faktor SDM, karena informasi finansial yang bermutu tidak sanggup terealisasi tanpa adanya keterkaitan sumber daya manusia. Dapat dikatakan seseorang yang mempunyai pengetahuan akuntansi adalah orang yang cerdas dan cermat serta mengerti metode akuntansi yang mencapai satu laporan finansial yang diterapkan sesuai atas dasar dan kriteria pada PP No 71 Tahun 2010 tentang Etika Akuntansi Pemerintahan yang mengatakan indikator mutu informasi finansial yaitu: relevan, teruji, bisa dimengerti dan bisa dibedakan.

Arti penting pengetahuan akuntansi bagi terciptanya pembentukan informasi finansial pemerintah daerah dapat didukung oleh penelitian (Lestari & Dewi, 2020),(Yeni et al., 2020),(Atika et al., 2019),(Hasanah, 2019), dan (Aniftahudin, 2016). Tetapi hal ini tidak sependapat dengan pengamatan (Nova, 2015).

Dampak Sistem Pengelolaan Intern Pemerintah Terhadap Mutu Informasi Finansial Pemerintah Daerah

Hasil Hipotesis H₂ diterima, artinya Sistem Pengelolaan Intern Pemerintah berdampak positif dan berdampak signifikan terhadap Mutu Informasi Finansial Pemerintah. Ditunjukkan oleh hasil pemeriksaan pada pengamatan menunjukkan bahwa sistem pengelolaan intern pemerintah secara parsial memiliki dampak yang positif dan signifikan pada mutu informasi finansial pemerintah daerah se-Kabupaten Deli Serdang.

Secara teoritis, hasil riset ini sejalan dengan teori agency disebabkan pihak agen atau pemerintah daerah telah mempertanggungjawabkan semua yang menjadi tanggung jawabnya secara maksimal dalam pembentukan informasi finansial pemerintah daerah sebagai pertanggungjawabannya kepada. Mutu informasi finansial pemerintah daerah dapat dipengaruhi oleh faktor pengelolaan intern pemerintah yang baik, karena informasi finansial yang berkualitas harus mampu memiliki unsur transparansi dan akuntabilitas (Setiawan, 2012).

Sistem pengelolaan intern pemerintah memiliki arti penting dalam pembentukan informasi finansial pemerintah daerah yang bermutu, hal ini didukung oleh penelitian (Lestari & Dewi, 2020), Utami dan Merta (2020), (Mulia, 2018), (Mene et al., 2018). Wijayanti (2017), dan (Sari, 2016). Tetapi hal ini tidak sependapat dengan pengamatan (Purba et al., 2021), (Kaifah & Tryana, 2020).

Dampak Penggunaan Teknologi Informasi Pada Mutu Informasi Finansial Pemerintah Daerah

Hasil Asumsi H₃ diterima, artinya Penggunaan Teknologi Informasi berdampak positif dan berdampak signifikan pada Mutu Informasi Finansial Pemerintah. Ditunjukkan oleh hasil pemeriksaan dalam pengamatan menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi secara parsial mempunyai dampak yang positif dan signifikan terhadap mutu informasi finansial pemerintah daerah se-Kabupaten Deli Serdang.

Secara teoritis, hasil riset ini sejalan dengan teori agency disebabkan pihak agen atau pemerintah daerah telah mempertanggungjawabkan semua yang menjadi

tanggung jawabnya secara maksimal dalam pembentukan informasi finansial pemerintah daerah sebagai pertanggungjawabannya kepada. Karena jika teknologi informasi tidak dimanfaatkan secara maksimal maka tidak dapat membangun informasi yang akurat sehingga kurang memberikan manfaat bagi instansi tertentu (Tiara, 2019). Jadi seharusnya, teknologi informasi haruslah dimanfaatkan semaksimal mungkin seperti kelengkapan perangkat keras komputer, perangkat lunak komputer, jaringan komunikasi, database dan personalia teknologi informasi harus benar-benar dimanfaatkan agar laporan finansial pemerintah daerah mampu menghasilkan informasi akuntansi yang berkualitas, dengan teknologi informasi yang maksimal, informasi akuntansi tersebut dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka peningkatan kinerja pemerintah daerah.

Pentingnya dampak pengelolaan teknologi informasi dalam pembentukan informasi finansial pemerintah daerah juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Purba et al., 2021), Wibawa dan Sinarwati (2017), Wijayanti (2017), (Aniftahudin, 2016), dan (Haza, 2015). Tetapi pengamatan yang diteliti oleh (Setyowati & Isthika, 2014) menyatakan bahwa pengelolaan teknologi informasi tidak berdampak pada mutu informasi finansial pemerintah daerah.

Dampak Fungsi Internal Audit Pada Mutu Informasi Finansial Pemerintah Daerah

Hasil Hipotesis H₄ ditolak, artinya Fungsi Internal Audit berdampak negatif dan tidak signifikan pada mutu informasi finansial aparat daerah. Ditunjukkan oleh hasil pemeriksaan dalam penelitian menunjukkan bahwa fungsi internal audit secara parsial mempunyai dampak yang negatif dan tidak signifikan pada mutu informasi finansial pemerintah daerah se- Kabupaten Deli Serdang.

Secara teoritis, hasil riset ini tidak sejalan dengan teori agency disebabkan pihak agen atau pemerintah daerah tidak melaksanakan fungsinya yaitu pengendalian internal dengan baik sesuai dengan harapan dari principal belum maksimal dalam menjalankan tanggung jawabnya dalam meningkatkan mutu informasi finansial aparat daerah dalam menyusun informasi finansial pemerintah daerah. Pentingnya peran internal audit akan berdampak mutu informasi finansial aparat daerah karena pemerintah pusat/BPK akan mengaudit informasi finansial aparat daerah dan menilai/ memberikan opini terkait hasil penyusunan informasi finansial aparat daerah. Akan lebih baik apabila aparatur internal audit semakin memaksimalkan kinerja ketaatan terhadap kebijakan dan prosedur agar penilaian terhadap pembentukan informasi finansial aparat daerah semakin akurat dan andal, sehingga opini yang diterima akan lebih baik pula. Hasil yang didapatkan dalam pengamatan ini juga didukung oleh hasil pengamatan terdahulu yang diteliti oleh (Setyowati & Isthika, 2014) yang berhasil mendapatkan fungsi internal audit tidak mempunyai dampak pada mutu informasi finansial aparat daerah. Hasil tersebut juga didukung oleh pengamatan yang dilakukan Martadinata (2017) yang di dalam pengamatannya juga mengatakan bahwa komitmen organisasi tidak mempunyai dampak yang signifikan pada akuntabilitas tata dana desa. Tetapi hasil pengamatan ini tidak sependapat pada pengamatan Astini (2019); Tarjo (2019); dan (Mada et al., 2017) yang menyatakan komitmen organisasi berdampak positif dan signifikan.

SIMPULAN

Dari penjelasan yang dikemukakan penulis dalam penelitian ini, sehingga penulis mengambil keputusan dari pengamatan ini yaitu bahwa pengetahuan akuntansi, sistem pengelolaan intern pemerintah, penerapan teknologi informasi berdampak positif dan signifikan pada mutu informasi finansial aparat daerah di Kabupaten Deli Serdang. Sedangkan fungsi internal audit berdampak negatif dan tidak signifikan pada mutu informasi finansial aparat daerah di Kabupaten Deli Serdang. Implementasi riset ini adalah dilihat dari pengetahuan akuntansi, sistem pengelolaan intern pemerintah daerah, penggunaan teknologi informasi dan fungsi internal audit yang dikelola dengan baik, benar dan tepat sasaran akan meningkatkan mutu informasi finansial pemerintah daerah terutama bagi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Dari faktor-faktor yang mempengaruhi mutu informasi finansial pemerintah daerah, penulis hanya meneliti dari variabel pengetahuan akuntansi, sistem pengelolaan intern pemerintah, penggunaan teknologi informasi dan fungsi internal audit bentuk keterbatasan dari pengamatan ini. Lokasi penelitian hanya dilakukan pada Organisasi Perangkat Daerah se-Kabupaten Deli Serdang. Tahun pengamatan hanya tahun 2022 dan Responden penelitian ini hanya bagian finansial di setiap perangkat daerah. Adapun saran untuk riset selanjutnya adalah Bagi pihak pemerintah daerah Kabupaten Deli Serdang, hendaknya lebih memperbaiki/meningkatkan aspek fungsi internal audit untuk menunjang penyusunan laporan finansial pemerintah daerah yang bermutu. Kemudian aspek pemahaman akuntansi, sistem pengelolaan intern pemerintah dan penggunaan teknologi informasi untuk tetap bisa dipertahankan dengan baik kedepannya. kemudian variabel yang berpengaruh agar lebih dipertahankan, kemudian Pengamatan selanjutnya dapat menambahkan faktor-faktor lain yang berdampak pada mutu informasi finansial aparat daerah, seperti komitmen organisasi, pengalaman kerja, kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar keuangan daerah, pengalaman akuntansi dan lainnya. Memperluas wilayah penelitian daerah lain sebagai objek penelitian. Metode penelitian menggunakan kualitatif untuk melakukan wawancara secara mendalam terhadap permasalahan yang sedang dihadapi, dalam hal ini mutu informasi finansial aparat daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anifthudin, A. (2016). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah dan Teknologi Informasi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada SKPD Kabupaten Indragiri Hilir). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*.
- Atika, D. (2019). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pengalaman Kerja Serta Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Medan. *Warta Dharmawangsa*.
- Elfauzi, A. F. (2019). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas

- Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Demak). *Diponegoro Journal of Accounting*.
- Endianto, M. (2017). Pengaruh Efektivitas Standar Pemerintah, Peran Internal Audit Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah Se-Kabupaten Bangli). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Undiksha*.
- Hakim, A. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada SKPD Kabupaten Indragiri Hulu). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau 4 (1)*.
- Hasanah, Y. A. (2019). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Peran Internal Audit, Dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada SKPD Di Pemerintah Kabupaten Sukoharjo). *The 9th University Research Colloquium (URECOL)*.
- Haza, I. (2015). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada SKPD Pemerintah Kota Padang). *Jurnal Akuntansi*.
- Kaifah, U. (2020). Faktor- faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa. *Jurnal of Accounting, Finance, and Auditing*.
- Khoirina. (2018). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen.
- Lestari, N. L. (2020). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan . *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*.
- Mene, R. E. (2018). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Riset Akuntansi*.
- Mulia, R. A. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat). *Jurnal EL-RIYASAH*.
- Nazaruddin. (2018). Pengaruh Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintahan Kota Lhokseumawe). *Jurnal Akuntansi dan Pembangunan (JAKARTABANGUN) STIE Lhokseumawe*.
- Nova, W. S. (2015). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Komitmen Karyawan, Dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sijunjung). *Jurnal Akuntansi*.

- Riandani, R. (2017). Pengaruh Kompetensi SDM, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada SKPD Kab. Limapuluh Kota). *Jurnal Akuntansi*.
- Setyowati, L. (2016). Faktor faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang.
- Sukmaningrum. (2012). Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Semarang). *Undergraduate thesis, Fakultas Ekonomika dan Bisnis*.
- Suyono, N. A. (2016). Identifikasi Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintahan Kabupaten Wonoboso). *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ 3(3)*, 237-248.
- Utami, N. P. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan, Pengendalian Internal dan Pemahaman Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Klungkung). *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa*.
- Wibawa, K. A. (2017). Faktor Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada SKPD Kabupaten Buleleng. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha 8 (2)*.
- Wijayanti, L. (2017). Pengaruh Kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, dan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (DPPKAD Kabupaten Sukoharjo). *Simposium Nasional Akuntansi XV 20*.
- Yeni, E. (2020). Pengaruh Pemahaman Akuntansi dan Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Pemerintah Kota Pekanbaru). *Research in Accounting Journal (RAJ) 1(1)*, 64-88.